

Jawa Pos

RADAR PROMO

6 FEBRUARI 2020

JAWA POS EDISI PROBOLINGGO

HALAMAN



JP: Bakorpakem Kabupaten Pasuruan saat menggelar pertemuan tertutup dengan Ningsih Tinampi di rumahnya di Pandaan. Ikut juga tim dari Dinkes

RIZAL F. SYATORU/JAWA POS RADAR BROMO



TENTANG
NINGSIH

BANGIL, Radar Bromo- Pembangunan dua gedung di Kompleks Perkantoran Raci diancang-ancang dilakukan mulai April ini. Pembangunan dua gedung tersebut akan membutuhkan waktu yang tak terduga. Bisa mencapai enam bulan.

Kepala Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Hari Aprianto mengungkapkan, pembangunan dua gedung kantor di Kompleks Perkantoran Raci masih dalam proses perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan untuk berkas pengajuan lelang. Untuk pengajuan masih penyusunan dokumen perencanaan. Kami akan bisa selesai agar bisa segera dilelang," jelasnya.

Untuk itu, dua gedung kantor yang akan dibangun ini menelan dana yang cukup besar. Setidaknya, Rp 44 miliar akan dialokasikan untuk dua gedung tersebut. Sebab, masing-masing gedung akan menghabiskan Rp 22 miliar.

Dua gedung itu diancang-ancang bisa mulai dibangun April 2020. Sehingga, dua gedung berantai tiga lantai bisa dirampungkan pelaksanaannya bisa dalam waktu enam bulan.

Untuk itu, tidak Oktober sudah selesai," imbuhnya.

Penggunaan dua gedung itu akan belum diketahui. Apakah yang akan dioperasikan. Yang jelas, ada beberapa OPD yang masih beroperasi di wilayah Kota Pasuruan. Baik Komininfo, Dinas Perhubungan, dan sejumlah dinas lainnya.

Pembangunan dua gedung kantor ini sebagai upaya pemindahan perkantoran ke lokasi baru.

Di Kompleks Perkantoran Raci memang sudah ada dua gedung OPD yang akan dibangun. (one/mie)

BANGIL, Radar Bromo- Datangnya musim hujan, membuat warga Masangan, Kecamatan Bangil waswas. Pasalnya, datangnya musim hujan kerap membuat kawasan setempat kebanjiran.

Kondisi itu terjadi seiring dengan luapan air Sungai Masangan. Anak Sungai Kedunglarangan itu kerap meluap lantaran tak mampu menampung volume air yang meningkat karena hujan.

Kepala Dusun/Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Sukisno menguraikan, banjir memang kerap

terjadi setiap tahunnya. Kondisi itu disebabkan melubernya air Sungai Masangan. "Seperti beberapa hari kemarin. Banjir melanda kawasan sini," ungkapnya.

Pihaknya mengaku sudah berusaha untuk mengusulkan penanganannya sungai setempat. Baik dengan usulan pembuatan sudetan hingga usulan normalisasi. Namun, hingga sekarang tidak kunjung ada penanganan. Padahal, normalisasi ataupun pembangunan sudetan dibutuhkan. Supaya, meminimalisasi luapan air.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib menguraikan, Sungai Masangan memang masuk kewenangan Pemprov Jatim. Namun, Pemkab berencana untuk melakukan normalisasi di sungai setempat. "Kami akan ajukan surat pemberitahuan ke Pemprov. Kami memang berencana untuk menormalisasi Anak Sungai Masangan. Dan sekaligus Sungai Masangan sendiri," timpalnya. (one/mie)

menantu suami siri korban asal Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, mendatangi korban ke tempat kerjanya.

Sesampainya di lokasi, pelaku mengajak korban keluar. Namun, korban menolak. Sehingga, saat itu juga pelaku *ngamuk*. Pelaku memaksa korban dengan menjambak rambut dan memukul leher korban.

Selain itu, juga mengancam de-

jadi jadi buron dari pengejaran," ujar Motif penganiayaan. Motif penganiayaan itu pelaku kesabaran. Sebab, mereka Pelaku sendiri ini. Namun, korban itu. "Pelakunya terancam dengan pasal 351 dan 335 KUHP, yang ancaman maksimalnya lima tahun penjara. (zal/mie)

Mengawal RUU Omnibus Law

BARU-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan 50 (lima puluh) rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Empat di antaranya yakni RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian disebut-sebut sebagai *omnibus law*.

Pemerintah sudah mengonfirmasi bahwa beberapa RUU yang masuk dalam konsep *omnibus law* sudah ditetapkan sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang mau tidak mau harus tuntas dan disahkan di tahun ini.

Omnibus law sendiri merupakan suatu terobosan hukum yang biasanya diterapkan di



Oleh
WIWIN ARIESTA, S.H., M.H.*

negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika, yang mana berarti satu aturan hukum dibuat untuk menggantikan beberapa aturan hukum yang lama sekaligus. Beberapa pakar hukum di Indonesia percaya bahwa pendekatan *omnibus law* juga bisa menjadi solusi atas tumpang tindih regulasi di Indonesia. Baik dalam hirarki vertikal maupun horizontal yang seringkali

saling berbenturan. Sehingga, menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

RUU *omnibus law* dalam perkembangannya memang banyak mendapat sorotan serta reaksi dari masyarakat. Khususnya Jawa Timur, terutama RUU Cipta Lapangan Kerja. Sebagaimana yang kita ketahui, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang relatif tinggi.

Beberapa pihak bahkan sudah ada yang menggalang aksi menolak RUU *omnibus law* "Cilaka" karena dalam beberapa pasalnya ditengarai akan menguntungkan kaum pengusaha dan merugikan kaum pekerja.

Di sisi lain, Pemerintah meyakini bahwa RUU "Cilaka" sendiri dirancang untuk menaikan iklim investasi di Indonesia. Sehingga, bisa membuka lebih

banyak lapangan kerja.

Problematisasi bidang ketenagakerjaan di Indonesia memang masih menanggung banyak dilema dan permasalahan di beberapa sisi. RUU *omnibus law* sendiri saat ini masih berupa draf/konsep. Sehingga, sebaiknya kita menunggu hasil pembahasan di DPR RI.

Berharap agar kebijakan-kebijakan pemerintah tidak menindas bangsa sendiri. Mari kita tunggu, kita kawal dengan cara-cara yang baik dan pastikan pembahasan di DPR RI terkait *omnibus law* bisa maksimal dan menghasilkan produk hukum baru yang sejalan dengan semangat Pancasila. (*)

**) Dosen Universitas Merdeka Pasuruan, Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Unmer Pasuruan*

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNG

Menunjuk Pengumuman Lelang Pertama tanggal 22 Januari 2020. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Perwakilan di J. Jenderal Basuki Rahmad No. 75 - 77 Lt.2 Malang, dengan seijin Kantor Pengawasan dan Lelang (KPNL) Sidoarjo akan melaksanakan penjualan umum lelang eksekusi hak tanggungan melalui internet (Open Bidding) pada Aplikasi Lelang Internet berupa barang jaminan milik:

- 1. CV KASTURI PRIMA SEJATI**
- Satu paket Tanah dan Bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya luas total 992/469/Parejelo tgl. 23-04-2012, an. Sri Sunardi, SU No. 35/Parejelo/2012 tgl. 17-04-2012; SHM 2011, an. Andi S Yono, SU No. 27/Parejelo/2011 tgl. 25-07-2011; SHM 461/Parejelo tgl. 26-07-2011, an. Sri Sunardi, SU No. 26/Parejelo/2011 tgl. 26-07-2011, dan SHM 459/Parejelo tgl. 26-07-2011, an. Sri Sunardi, tgl. 26-07-2011 yang terletak di Jl. Raya Surabaya - Malang Km. 67,5 Desa Parejelo, Kec. Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan luas 700.000.000,- dan uang jaminan sebesar Rp 3.130.070.000,- dan uang jaminan sebesar Rp 700.000.000,-

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- 1. Cara Penawaran**
Lelang dilaksanakan dengan penawaran lelang melalui internet (Open Bidding) tanpa pertemuan fisik. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui internet pada alamat: www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti di atas nama "Tata Cara Penawaran Lelang" pada domain tersebut.
- 2. Pendaftaran**
Calon peserta lelang dan mengikuti lelang pada alamat domain diatas dan memilik KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.
- 3. Waktu Pelaksanaan**
Penawaran diajukan melalui domain di atas sejak pengumuman ini terbit sampai dengan:
Hari : Kamis
Tanggal : 20 Februari 2020
Waktu Penawaran : 09.00 - 11.00 (waktu server)
Waktu Penutupan : 11.00 (waktu server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPNL Sidoarjo
Jalan Erlangga No. 161 Sidoarjo
Penetapan Penjualan : Setelah batas akhir penawaran
- 4. Uang Jaminan Lelang**
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah nominal yang PERSIS dengan uang jaminan disyaratkan penjabar dalam pengumuman lelang ini dan di sudah efektif ditrima oleh KPNL sebelum-lambatnya (satu) hari kerja sebelum penjabar. Uang jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Untuk status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan identitas dinyatakan valid.
- 5. Penawaran Lelang**
Penawaran lelang dimilik paling seikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat menang jika menang.
- 6. Penawaran Lelang**
Pemegang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sekali dan sekalian kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan akan disetorkan ke kas negara.
- 7. Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi** PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Malang, 06 Februari 2020
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Wilayah Malang